

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional disamping prioritas yang lainnya, yaitu penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pendidikan merupakan usaha manusia yang paling utama dan berkaitan dengan tujuan negara yang tertulis dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-3 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan maka diperlukan pengaturan yang diperuntukan mengatur sistem pendidikan di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 13 menjelaskan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan dan pembiayaan pendidikan sangat berkaitan dengan berbagai

kegiatan. Dapat diartikan tanpa ada pembiayaan pendidikan maka kegiatan pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan untuk mencapai pendidikan yang optimal. Pembiayaan pendidikan diperuntukan untuk menunjang seluruh kegiatan operasional dan *non-operasional* pendidikan.

Dedi Supriadi (2003: iii) mengemukakan pendapat bahwa “biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan”. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya dapat berasal dari bermacam-macam sumber. Biaya pendidikan bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan, swasta, dunia usaha dan orang tua. Selanjutnya Supriadi (2003:3) mengungkapkan bahwa biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni “semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa biaya pendidikan meliputi: “Biaya satuan pendidikan, Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan

Biaya pribadi peserta didik”. Biaya satuan pendidikan seperti yang dijelaskan pada pasal 3 meliputi biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan dan *non* lahan pendidikan, biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan *non* personalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.

Mengingat pentingnya biaya pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46 ayat (2), yaitu “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.” Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa biaya pendidikan di Indonesia bersumber dari pemerintah, badan-badan tertentu, dan perorangan sebab, pada dasarnya, pendidikan dilihat dari segi pelaksanaannya dan pembiayaannya, merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Sekolah harus mampu bertanggung jawab kepada pemerintah serta *stake holder* yakni orang tua siswa serta masyarakat mengenai pembiayaan pendidikan serta kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah guna terlaksananya asas transparansi, akuntabilitas dan *valid*. Keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tampak jelas dalam Undang-Undang Dasar yang memprioritaskan biaya pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jauh melampaui biaya penyelenggaraan pertahanan maupun kesehatan atau departemen lainnya (Suhardan, 2012:11).

Seperti kita ketahui, Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 para siswa sekolah di pendidikan menengah tidak akan lagi dipungut biaya SPP. Pemerintah telah menyiapkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA/SMK. Pada waktu itu Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, hal itu dilakukan karena program wajib belajar sembilan tahun (wajib 9 tahun) sudah berjalan lancar dan diprediksi akan selesai pada 2012. Pemerintah akan lebih fokus untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan dana untuk satuan pendidikan menengah yaitu SMA dan

SMK. Untuk Sekolah Kejuruan, dana tersebut dinamakan Dana BOS SMK. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS SMK, BOS SMK adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta. Dana BOS SMK secara garis dasar yakni:

1. Merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMK negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non-Personalia Sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran.
3. Besaran dana BOS SMK yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya bantuan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS SMK. Pemerintah mengalokasi besaran dana BOS SMA/SMK pada tahun 2015 Rp 1.200.000 per siswa per tahun. (Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 2015). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 menjelaskan tentang standar biaya operasional *non-personalia* di SMK Negeri 15 Kota Bandung yakni program keahlian pekerjaan sosial dan akomodasi perhotelan masing-masing berbeda. Besaran standar biaya *non-personalia* dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Standar Biaya Operasi *Non Personalia* Menurut Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009

No	Program Keahlian	Biaya Satuan Persiswa/bulan	Biaya Satuan Persiswa/Tahun
1	Pekerjaan Sosial	Rp 139.232	Rp 1.670.790
2	Akomodasi Perhotelan	Rp 146.080	Rp 1.752.960

Setelah dilakukan observasi awal terkait sumber pendapatan pendidikan di SMK Negeri 15 Kota Bandung yakni bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komite sekolah melalui DSP dan SPP. Besaran biaya akan di jelaskan pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Besaran Biaya Satuan Berdasarkan Perhitungan di Sekolah

No	Program Keahlian	Biaya Satuan Per Tahun	Biaya Satuan Per Bulan
1	Pekerjaan Sosial	Rp 8.539.088	Rp 711.590
2	Akomodasi Perhotelan	Rp 8.539.088	Rp 711.590

Sumber: Lampiran 2

Total biaya satuan untuk memenuhi kegiatan operasional dan pengembangan di SMK Negeri 15 Kota Bandung untuk program keahlian akomodasi perhotelan dan pekerjaan sosial sebesar Rp 8.539.088 per tahun, dan biaya satuan per bulan sebesar Rp 711.590. Dengan disamaratakan biaya satuan antara program keahlian yang ada, maka pengalokasian sumberdana pendidikan

akan kurang tepat sasaran. Karena masing-masing program keahlian mempunyai kegiatan yang berbeda-beda untuk dibiayai oleh sumber pembiayaan pendidikan.

Dengan perencanaan yang matang dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat akan mengurangi permasalahan yang ada selama ini. Saat ini pengelolaan keuangan di sekolah masih menggunakan metode tradisional, dana keuangan yang dikelola berdasarkan pada berapa kali kegiatan dilakukan. Dengan menggunakan perhitungan tradisional memungkinkan anggaran yang kurang dan penyerapan anggaran yang lebih dan akan menyebabkan biaya satuan yang dibebankan kepada siswa melalui SPP dan DSP menjadi tidak akurat.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Indra Bastian (2007:136), Indra Bastian (2007:136) mengemukakan “perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah yang ada selama ini sangat sederhana dan belum mampu mengungkapkan informasi sebagai materi atau landasan pengambilan keputusan, serta hanya sebatas informasi biaya per unit untuk belanja pegawai dan belanja *non* pegawai. Perkembangan terakhir dari sistem perhitungan biaya di entitas sekolah dasar dan menengah, serta cara-cara / inovasi baru dalam mencapai target dan tantangan yang dewasa ini terjadi belum diketemukan. Seperti belum adanya standar atau pedoman perhitungan biaya per unit siswa”.

Dengan memberikan informasi mengenai biaya satuan (*Unit Cost*) pendidikan maka akan mampu menjawab permasalahan yang ada. *Stake holder* atau pengguna pendidikan akan mengetahui besaran biaya satuan pendidikan dalam masing masing program keahlian yang berbeda-beda di Sekolah Menengah Kejuruan dan lembaga sekolah akan mampu mengelola biaya pendidikan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya informasi biaya satuan pendidikan maka *stake holder* pendidikan tidak akan mengetahui besaran biaya satuan pendidikan di SMK dalam program keahlian yang berbeda beda.

Fatah (2012:24) mengungkapkan, terdapat dua hal penting yang perlu dikaji dan dianalisis dalam konsep pembiayaan pendidikan, yaitu “biaya pendidikan secara keseluruhan (*Total Cost*) dan biaya pendidikan satuan (*Unit Cost*)”. Dengan menganalisis biaya satuan (*Unit cost*), memungkinkan untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan dan pemerataan pengeluaran masyarakat dan pemerintah untuk pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Biaya satuan atau *unit cost* perlu untuk diketahui dan memberikan informasi kepada *stake holder* pendidikan. Khususnya pemerintah dan orang tua siswa atau masyarakat guna terciptanya informasi biaya secara transparan, akuntabilitas dan *valid*. Dalam menentukan biaya satuan menurut Fattah (2009:26) “terdapat pendekatan, yakni pendekatan mikro dan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid atau menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan menurut jenis dan tingkat”.

Menurut Bastian (2007:136-152) Menyebutkan untuk menjawab permasalahan yang ada mengenai biaya satuan pendidikan terdapat beberapa metode untuk menghitung biaya satuan yang ada di sekolah menengah kejuruan yakni *Activity Based Costing*, *grade based costing*, dan *service based costing*. Peneliti akan lebih fokus untuk mengidentifikasi serta menghitung biaya satuan berdasarkan aktivitas dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*. Salah satu metode untuk menentukan biaya satuan yakni menggunakan metode *Activity Based Costing*. Menurut pendapat Sumarsan (2010:153) dalam pandangan di perusahaan “*Activity Based Costing* merupakan metode akuntansi biaya yang

digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan data tentang biaya operasional mereka”.

Activity Based Costing merupakan metode akuntansi biaya untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Dengan menghitung seluruh sumber pendapatan kemudian dibandingkan dengan seluruh biaya berdasarkan kegiatan atau aktivitas yang biasa dipergunakan oleh perusahaan. Metode *Activity Based Costing* juga dapat diterapkan pada lembaga pendidikan yakni di sekolah yang dikenal dengan metode *Activity Costing System*. Indra Bastian (2007:138) menjelaskan komponen penyusunan anggaran terdiri dari berbagai aktifitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya, digunakanlah alat bantu dalam penyusunan laporan biaya aktivitas yakni menggunakan *Activity Costing System (ACS)*, yang merupakan salah satu alat perhitungan biaya dalam pendekatan ekonomi. Menurut pendekatan ekonomi tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas yang dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan penjabaran jenis biaya dan aktivitas secara bersamaan, anggaran tahunan dapat dirinci secara lebih akurat.

Dari penjelasan diatas mengenai definisi *Activity Based Costing (ABC)*, penulis menarik kesimpulan bahwa *Activity Based Costing (ABC)* merupakan suatu metode perhitungan akuntansi biaya untuk menghitung biaya berdasarkan kegiatan atau aktivitas untuk menghasilkan produk/jasa (Siswa). Terdapat manfaat dan keunggulan dari sistem biaya *Activity Based Costing (ABC)* Nurhayati (2004:3-4) yaitu :

1. Suatu pengkajian sistem biaya ABC dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai hasilnya, mereka dapat berusaha

untuk meningkatkan mutu sambil secara simultan fokus pada pengurangan biaya yang akan memungkinkan.

2. Pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang wajar.
3. Sistem biaya ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan (*management decision making*) membuat-membeli yang manajemen harus lakukan, disamping itu dengan penentuan biaya yang lebih akurat maka keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen akan lebih baik dan tepat.
4. Memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan (*cost reduction*), pada sistem tradisional, banyak biaya-biaya yang kurang relevan yang tersembunyi.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, setyaningrum (2013), menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman sekolah dalam menghitung biaya satuan persiswa, kurangnya kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi biaya biaya yang terjadi di sekolah, keterbatasan kemampuan sekolah dalam menyajikan informasi biaya kepada *stake holder* pendidikan, belum memadainya sistem perhitungan biaya pendidikan yang dapat memberikan penjelasan perhitungan pembiayaan yang informatif, tepat sasaran, efisien dan akuntabel dan kurangnya pemahaman sekolah dalam pengelolaan biaya pendidikan atau dana yang diterima sekolah.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan perhitungan biaya menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC). Diharapkan melalui perhitungan *Activity Based Costing* ini dapat mengukur biaya layanan pendidikan secara akurat dan rinci dengan melakukan penelusuran tidak hanya pada seluruh siswa di sekolah namun lebih kepada tiap siswa dari masing masing program keahlian berdasarkan aktivitas atau kegiatan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis biaya satuan (*unit cost*) siswa yang ada dijenjang pendidikan menengah yaitu SMK. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil

judul “Penerapan Model *Activity Based Costing* (ABC) untuk Menentukan Biaya Satuan (*Unit Cost*) di SMK Negeri 15 Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015-2016”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimanakah penerapan Model *Activity Based Costing* (ABC) untuk Menentukan Biaya Satuan (*Unit Cost*) di SMK Negeri 15 Kota Bandung tahun pelajaran 2015-2016”. Permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mengidentifikasi biaya satuan (unit cost) pelayanan pendidikan yang dihitung menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC) per siswa masing masing program keahlian di SMK Negeri 15 Kota Bandung
2. Berapa biaya satuan (unit cost) pelayanan pendidikan yang dihitung menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC) per siswa masing masing program keahlian di SMK Negeri 15 Kota Bandung.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penerapan Model *Activity Based Costing* (ABC) untuk menentukan Biaya Satuan (*Unit Cost*) di SMK Negeri 15 Kota Bandung tahun pelajaran 2015-2016.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi biaya satuan (*Unit Cost*) pelayanan pendidikan yang dihitung dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC) per siswa masing-masing program keahlian di SMK Negeri 15 Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya biaya satuan (*unit cost*) layanan pendidikan per siswa per program keahlian di SMK Negeri 15 Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan yakni:

1. Manfaat Bagi Sekolah

Manfaat bagi SMK Negeri 15 Kota Bandung, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menghitung kebutuhan siswa untuk tahun tahun berikutnya dan bisa dijadikan biaya standar dalam penentuan biaya satuan pendidikan.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah Orang tua siswa, komite sekolah dan pemerhati pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai besaran biaya pendidikan bagi setiap siswa sehingga kedepannya bisa ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan dapat lebih bijak dalam menyikapi masalah yang ada pada pendanaan di sekolah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih lanjut mengenai analisa biaya satuan (*Unit cost*) di Indonesia.

4. Manfaat bagi penulis

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai penerapan *Activity Based Costing* dalam menentukan Biaya Satuan (*Unit Cost*).